



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2005 – 2025



#

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perlu disusun untuk kurun waktu 20 Tahun;
 - b. bahwa penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga perlu memuat visi, misi jangka panjang serta arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2005-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, memuat arah Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 20 (dua puluh) Tahun ke depan yaitu Tahun 2005-2025.
- (2) RPJPD merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu Tahun 2005-2025.
- (3) RPJPD merupakan rujukan dasar bagi para calon Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan visi dan misi dalam kurun waktu 2005-2025.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2005-2025 bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi SKPD maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Tingkat Atas;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat..

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB III : VISI DAN MISI DAERAH

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah RPJPD yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pada akhir periode berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditinjau untuk disesuaikan dengan Program Pembangunan Nasional, Arah Pembangunan Daerah, Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 10



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Jazirah Sulawesi dan secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu kabupaten dengan luas wilayah laut jauh lebih besar dari wilayah daratnya, orientasi pembangunan saat ini dan ke depan seyogyanya menempatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama yang dipandang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Selayar ke depan.

Namun upaya ke arah tersebut, memerlukan adanya proses transformasi, baik transformasi struktural maupun transformasi sosial agar Kabupaten Kepulauan Selayar, benar-benar dapat menjadikan wilayah laut dengan segala potensinya sebagai gerbong utama yang membawa Selayar kepada kemajuan dan kemapanan. Transformasi struktural dibutuhkan untuk mendorong peran dan kontribusi subsektor kelautan dan perikanan pada sektor pertanian sebagai subsektor yang tangguh dengan besaran kontribusi mencapai 75% terhadap pembentukan sektor pertanian. Sedangkan transformasi sosial dibutuhkan untuk mendorong terjadinya pergeseran budaya dari budaya agraris (kontinen) ke budaya bahari (maritim). Kedua proses transformasi ini hendaknya berjalan secara silmultan melalui *strong policy* dan *political will* dari segenap pemangku kepentingan yang ada, dan menjadi agenda penting dalam sistem perencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh karena itu, sesuai arahan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, di mana daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan, maka dalam konteks Kabupaten Kepulauan



Selayar, pendekatan yang akan ditempuh dalam menyusun RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2005 – 2025 adalah menempatkan wilayah laut sebagai modal dasar dan tumpuan ekonomi daerah ke depan.

Selain itu, RPJPD ini juga sekaligus membuktikan keseriusan Selayar dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap akselerasi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tingkat regional dan akselerasi pembangunan nasional. Periode masa pelaksanaannya dimulai tahun 2005 dan berakhir tahun 2025 yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sebagaimana yang diamanahkan pasal 8 ayat (20) berikut penjelasannya dan lebih diperjelas lagi pada alinea 12 penjelasan umumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 - 2025 disusun dengan maksud untuk melahirkan sebuah dokumen perencanaan jangka panjang sebagai pedoman bagi segenap stakeholder daerah dalam melaksanakan berbagai aktifitas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuannya adalah: (a) membangun kesepahaman bersama tentang arah dan sasaran pembangunan jangka panjang ke depan; (b) pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasikan rencana penyelenggaraan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional; (c) sebagai payung dalam menyusun RPJMD dan dokumen perencanaan Tahunan seperti RKPD, dan APBD.



C. LANDASAN HUKUM

Landasan idiil RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);



7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)

D. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Keterkaitan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 dan RPJP Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan;



2. RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar setiap lima tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kepulauan Selayar yang isinya mengacu kepada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan menjadi acuan penyusunan Rencana Strategik SKPD;
3. RKPD Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui Musrenbang, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahun.

E. PENDEKATAN DAN SISTEMATIKA

RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 disusun dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis merupakan Kabupaten yang berciri maritim. Oleh karena itu, proses penyusunan dilakukan dengan menggunakan empat pendekatan meliputi : (a) teknokratis; (b) politik; (c) *top down*; dan (d) *bottom up*. Selain itu, cara pandang yang dilakukan dalam menyusun RPJPD ini adalah cara pandang kewilayahan dan kemandirian yang bertumpu pada kemampuan melakukan pengelolaan



wilayah laut. Prinsip-prinsip yang akan diterapkan meliputi : (a) demokratis; (b) partisipatif; (c) Transparansi; (d) Akuntabilitas; (e) berkelanjutan; (f) berkeadilan sosial; dan (g) berdaya saing.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini, sangat ditentukan oleh kerjasama yang sinergis dan simultan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut, diharapkan dapat mengambil peran sesuai fungsi masing-masing sehingga visi pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP dengan dokumen perencanaan lainnya, pendekatan dan sistematika.

Bab Kedua, adalah bab gambaran umum dan analisis isu strategis, meliputi : Kondisi umum dan isu strategis.

Bab Ketiga, adalah bab visi dan misi daerah yang berisi: visi, misi, dan nilai

Bab Keempat, adalah bab arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 yang meliputi : Arah Kebijakan, Sub Wilayah Pengembangan, dan Pentahapan RPJPD.

Bab kelima, adalah bab kaidah pelaksanaan.

Bab keenam, adalah bab penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN ISSU-ISSU STRATEGIS

A. Kondisi Umum

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Secara Geografis, Selayar terletak di antara 5°42' – 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' – 122°30' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba di sebelah Utara, Laut Flores sebelah Timur, Laut Flores dan Selat Makassar sebelah Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Selatan.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 26 buah.

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km² dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km². Secara administratif pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan, 67 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing



Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Benteng, jumlah rata-rata hari hujan sekitar 7 hari dengan curah hujan 155,6 mm, sedangkan berdasarkan Stasiun Meteorologi Bontometene hari hujan rata-rata 7 hari dengan curah hujan sekitar 155,6 mm, dan berdasarkan Stasiun Meteorologi Bontosikuyu rata-rata hari hujan sekitar 11 hari dengan curah hujan sekitar 246,1 mm.

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring dengan tipe iklim wilayah ini termasuk tipe B dan C. Musim hujan pada bulan November hingga Juni dengan curah hujan mencapai lebih 200 mm, sedangkan musim kemarau pada bulan Agustus sampai September.

Pada kenyataannya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini, belum terdata secara komprehensif, baik yang sudah diketahui keberadaannya, maupun potensi yang belum terdata. Mengingat potensi sumberdaya alam merupakan modal dasar pembangunan, maka keberadaan data yang menginformasikan keluasan dan penyebaran potensi sumberdaya alam keseluruhan menjadi sebuah keniscayaan. Tuntutan dan kebutuhan data tersebut dapat dipenuhi melalui pencatatan akuntansi dan penyusunan neraca sumberdaya alam yang menggabungkan antara potensi sumberdaya alam yang ada di darat dengan potensi yang ada di wilayah laut sesuai kondisi geografis Selayar.

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam tersebut sejatinya memperhatikan aspek keseimbangan antara eksploitasi untuk memperoleh manfaat ekonomi dan pelestarian untuk memperoleh



manfaat fungsi dan jasa lingkungannya sebagai penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kebijakan pemerintah pada masa lalu yang lebih menekankan pada eksploitasi sumberdaya alam yang ada di darat, seperti hutan dan potensi tambang, telah berdampak terhadap eksistensi fungsi lingkungan hidup. Berbagai kasus yang telah menimpa baik dalam skala nasional, regional maupun lokal, cukup memberikan bukti kepada kita bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan dalam mengeksploitasi potensi sumber daya alam yang ada pada masa lalu.

Demikian pula pada wilayah laut, eksploitasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan, telah merusak ekosistem laut terutama ekosistem terumbu karang.

Saat ini, adalah pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan segenap pihak-pihak yang berkepentingan dan berkompeten untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang kian hari kian memprihatinkan. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi lingkungan hidup yang ada saat ini, telah menjadi beban berat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanganinya. Rusaknya Hutan Rakyat yang ada di Pulau Jampea, Lambego, dan Kalaotoa, telah mengancam masyarakat akan ketersediaan air baku yang semakin menipis dan akan memberi dampak terhadap aktivitas usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan yang selama ini digeluti oleh masyarakat. Sementara pada wilayah laut, kondisi ekosistem terumbu karang semakin mengalami degradasi sebagai dampak dari aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan, seperti bom dan bus.



2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2007 mencapai 117.860 jiwa terdiri dari 34.931 atau 29,64 % penduduk berusia 0-14 tahun dan 66.731 atau 56,61 % penduduk berusia 15-54 tahun; serta 8.279 jiwa atau 7,02 % penduduk berusia 55-64 tahun. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2008 mencapai 119.811 jiwa, yang terdiri dari 56.756 orang laki-laki dan 63.055 orang perempuan; dengan seks rasio : 90,01 dengan komposisi penduduk meliputi : 35.521 atau 29,65 % penduduk berusia 0-14 tahun; 67.881 atau 56,66 % penduduk berusia 15-54 tahun; dan 8.347 atau 6,97.% berusia 55 - 64 tahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2003 sampai dengan 2007 adalah rata-rata 86 jiwa/ per km² sedangkan pada tahun 2008 kepadatan penduduk mencapai rata-rata 88 per km². Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Benteng dengan kepadatan 2.604 jiwa/per km². Sedangkan Kecamatan terjarang penduduknya adalah Kecamatan Pasimarannu dengan kepadatan 50 jiwa/per km².

Distribusi penduduk perkecamatan pada tahun 2008 adalah :

- a. Kecamatan Bontomatene dengan jumlah penduduk 13.721 jiwa dengan kepadatan 86 Jiwa/per km²
- b. Kecamatan Bontomanai 13.425 jiwa dengan kepadatan 116 jiwa/km²
- c. Kecamatan Benteng 18.540 jiwa dengan kepadatan 2.604 jiwa/km²;
- d. Kecamatan Bontoharu 11.693 jiwa dengan kepadatan 90 Jiwa/Km²
- e. Kecamatan Bontosikuyu 14.278 jiwa dengan kepadatan 72 Jiwa/Km²
- f. Kecamatan Taka Bonerate 11.794 jiwa dengan kepadatan 53 Jiwa/Km²
- g. Kecamatan Pasimasunggu 6.907 jiwa dengan kepadatan 60 Jiwa/km²



- h. Kecamatan Pasimasunggu Timur 6.498 jiwa dengan kepadatan 136 Jiwa/Km²
- i. Kecamatan Pasimarannu 8.821 jiwa dengan kepadatan 50 Jiwa/Km²
- j. Kecamatan Pasilambena 7.411 jiwa dengan kepadatan 72 Jiwa/Km²

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2002 sampai dengan 2005 adalah rata-rata 2,04 %. Dengan prediksi laju pertumbuhan 2,50 %, maka pada Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar berpenduduk kurang lebih 2.262.912 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada Ibukota Kabupaten dalam hal ini Kecamatan Benteng adalah rata-rata 2,50 %. Dengan demikian diprediksi pada tahun 2025 Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar berpenduduk kurang lebih 355.968 Jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Ibukota Kabupaten lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2007 baru mencapai 67,39. Kondisi ini masih berada di bawah IPM Sulawesi Selatan yang mencapai 69,62 pada tahun yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, serta rendahnya daya beli masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2007 baru mencapai 67,20 tahun, sedangkan angka harapan hidup Sulawesi Selatan telah mencapai 69,40 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat kesadaran masyarakat terhadap perbaikan gizi relatif masih rendah.



Peningkatan status dan derajat kesehatan dapat dilihat dari usia harapan hidup yang meningkat, menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta meningkatnya status gizi masyarakat. Angka kematian bayi masih berfluktuasi dari Tahun 2004 s/d 2008. Pada tahun 2004 kematian bayi 18,94 per 1000 KH, tahun 2005 turun menjadi 12,43 per 1000 KH, tahun 2006 menjadi 21,01 per 1000 KH, pada tahun 2007 turun menjadi 20,09 % per 1000 KH dan pada tahun 2008 turun lagi menjadi 10,39 per 1.000 KH. Angka kematian ibu yang berhubungan dengan persalinan masih relatif tinggi, bahkan lebih tinggi target nasional yakni 281,23 per 100.000 KH di tahun 2004 dan 148 per 100.000 KH di tahun 2005. Angka ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 125 per 100.000 KH pada tahun 2008, 668 per 100.000 KH pada tahun 2007, tahun 2006 yakni 471,12 per 100.000 KH, tahun 2005 sebesar 251,34 per 100.000 KH, dan pada tahun 2004 sebesar 400,23 per 100.000 KH. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi dan fasilitas pelayanan prenatal dan obstetric yang masih rendah. Angka kematian balita mengalami penurunan sekitar 5,04 per 100.000 dari 5,75 per 100.000 pada tahun 2004 menjadi 0,71 0/00. Angka Kematian Kasar juga relatif rendah yaitu sebanyak 155 jiwa atau 1,02 per 100.000. Angka ini masih relatif lebih rendah dari target nasional sebesar 7,5 per 100.000 penduduk.

Bila dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan jumlah penduduk 119.811 jiwa terdapat keluarga prasejahtera sebanyak 5.963 keluarga, Keluarga Sejahtera I sebanyak 8.126 keluarga, Keluarga Sejahtera II sebanyak 8.320, Keluarga Sejahtera III sebanyak 11.119 keluarga dan Keluarga Sejahtera III plus sebanyak 1.163 keluarga. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan secara



nasionalpun kondisi pembangunan manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia berada di urutan ke 102 dengan nilai indeks pembangunan manusia 64,3 dengan angka harapan hidup 66,2 angka melek huruf 88,4, lama rata-rata sekolah 6,7 tahun, dan pendapatan perkapita Rp. 578.800. sedangkan untuk Sulawesi Selatan, indeks pembangunan manusia lebih rendah dari nilai nasional, yaitu, 63,9 dengan angka harapan hidup 68,3 tahun, angka melek huruf 83,2, lama rata-rata sekolah 6,6 tahun dan pendapatan perkapita 564.500.

Dari kedua data perbandingan (Nasional dan Sulawesi Selatan) terlihat bahwa indikator pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berada di bawah rata-rata Nasional dan Sulawesi Selatan seperti angka melek huruf yaitu 82,57.

Kondisi pembangunan manusia juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2008, terdapat penduduk miskin sebesar 31.556 orang atau 7.889 Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih panjang dan membutuhkan kerja keras untuk mengeluarkan Indonesia dari keterbelakangan dalam hal pembangunan kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia minimal untuk keluar dari kelompok keterbelakangan adalah 80,5 atau diperlukan 14,4 angka lagi.

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor inilah yang paling bertanggungjawab terhadap lahirnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas di suatu negara. Sektor ini pula yang akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial dimasa depan karena sumberdaya manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan bidang pendidikan, sampai pada tahun 2008 di Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat jumlah Taman



Kanak-Kanak (TK) sebanyak 124 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 138 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.678 jiwa termasuk guru honor, murid sebanyak 15.470. Jumlah SMP sebanyak 28 buah dengan jumlah guru sebanyak 395 jiwa dan murid sebanyak 4.094 jiwa, jumlah SMU 8 buah dengan jumlah guru sebanyak 155 jiwa dan murid sebanyak 1.850 jiwa. Disamping itu terdapat pula Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar di Benteng.

Pada tahun 2008, penduduk Kepulauan Selayar yang tidak sekolah berjumlah 25.502 jiwa, berpendidikan SD sebanyak 30.360 jiwa, berpendidikan SMP sebanyak 11.371 jiwa, berpendidikan SMU sebanyak 9.975 jiwa, berpendidikan SMK sebanyak 1.408 jiwa, berpendidikan D1/D2 sebanyak 1.707 jiwa, berpendidikan D3 sebanyak 708 jiwa, berpendidikan DIV/S1/S2/S3 sebanyak 3.928 jiwa dengan angka partisipasi sekolah berdasarkan hasil susenas tahun 2008 sebesar 81,36%. Dengan kata lain dari 100 orang penduduk usia 7-18 tahun hanya 81 orang yang mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2007 terdapat angkatan kerja sebesar 49.642 orang atau 43,31 %. Diantaranya yang bekerja sebanyak 42.332 atau 85,28 % dari jumlah angkatan kerja, sedangkan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 7.310 orang atau 14,73 % dari jumlah angkatan kerja sebesar 49.642. Dari jumlah penduduk tersebut, yang melakukan kegiatan sekolah sebanyak 11.705 orang atau 10,89 %, yang mengurus rumah tangga 20.765 orang atau 24,22 %, dan kegiatan pasif lainnya sebanyak 6.250 orang atau 7,29 %.

Sementara dalam tahun 2008 terdapat angkatan kerja sebanyak 62.803 orang, telah bekerja sebanyak 46.103 orang dan pengangguran berjumlah 5.980 orang.

Sektor lapangan kerja yang paling banyak digeluti penduduk adalah sektor pertanian yang rata-rata menyerap angkatan kerja



sebanyak 29.466 orang, menyusul jasa-jasa service sebanyak 5.388 orang, perdagangan sebanyak 4.379, industri sebanyak 2.811 orang, lainnya sebanyak 4.079 orang.

3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal. Faktor utama penyebab ketertinggalan tersebut, selain karena terbatasnya infrastruktur yang mendorong peningkatan daya saing daerah, juga karena lemahnya SDM (baik pada sisi pemerintah daerah maupun pada sisi masyarakat).

Dalam kondisi keterbatasan tersebut, justru konsumsi masyarakat menjadi sangat dominan, sementara investasi dan aktivitas Ekonomi Produktif berjalan sangat lamban. Dari sekian sektor yang ada, hampir dapat dikatakan, kesemuanya tergantung pada intervensi pemerintah daerah melalui stimulan APBD. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2008 mencapai 7,27 % tak dapat disangkal juga sedikit banyaknya masih dipengaruhi oleh satu-satunya instrumen fiskal daerah yaitu APBD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Selayar sampai dengan saat ini masih sangat rapuh, belum mandiri karena masih mengandalkan perputaran ekonomi melalui investasi pemerintah daerah.

Ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah, masih sangat tinggi, terkonsentrasi pada sejumlah kecil masyarakat yang memiliki akses tinggi terhadap pelaksanaan APBD.



a. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran. Pada sisi produksi telah menunjukkan kenaikan yang cukup berarti dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2004 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 442.102,12 juta dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 771.304,98 juta atau mengalami perkembangan rata-rata 6 %. Adapun PDRB menurut harga konstan 2000 pada tahun 2004 sebesar Rp. 317.241,47 dan tahun 2008 sebesar Rp. 397.330,69 juta dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 % pertahun selama periode 2004-2008.

Pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka tersebut pada tahun 2008 terutama disebabkan adanya peranan sektor pertanian yang menyumbang sebesar 43,29 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menyusul sektor jasa sebesar 17,47 %; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,74 %; sektor angkutan dan komunikasi sebesar 10,74 %; sektor bangunan sebesar 8,76 %; sektor industri sebesar 3,81 %; sektor bank serta lembaga keuangan lainnya sebesar 2,31%; sektor pertambangan dan galian sebesar 0,49 % dan sektor listrik dan air minum sebesar 0,40 %. Pertumbuhan sektor - sektor ekonomi yang telah dicapai didominasi oleh 3 sektor yang memberi peranan cukup berarti dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sektor pertanian, sektor jasa serta perdagangan, hotel dan restoran.

Angka yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun menjadi dasar dalam rangka pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi 20 tahun kedepan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai simpul kegiatan ekonomi potensial memiliki daya dukung dan daya saing serta memiliki sarana dan fasilitas penunjang yang dapat mempermudah arus barang sekaligus



mendorong terciptanya sektor jasa dan sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dilihat dari PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun yang sama mengalami peningkatan berdasarkan harga berlaku dari Rp. 3.956.808 pada tahun 2004 menjadi Rp. 5.802.284 pada tahun 2008. dengan pertumbuhan rata-rata 14 %; sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun 2004 sebesar Rp. 2.839.307 dan pada tahun 2008 mencapai 3.121.508 dengan pertumbuhan rata-rata 6 %.

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah berlangsung pada periode tahun 2004-2008, tetapi jumlah angka pengangguran pada tahun 2008 sebesar 5.980 orang dari 62.803 jumlah angkatan kerja atau 10 %. Fenomena seperti ini juga tidak terlepas dari kinerja fiscal daerah untuk melakukan pembiayaan terhadap sektor-sektor strategis untuk dapat menanggulangi berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan.

b. Iklim Investasi

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, iklim investasi relatif dipengaruhi oleh (a) regulasi dan kelembagaan; (b) infrastruktur; dan (c) masalah tenaga kerja. Dari sisi regulasi dan kelembagaan masih jauh dari memadai, karena belum adanya regulasi di daerah yang menjamin kepastian dan keamanan berinvestasi, serta belum adanya lembaga pelayanan di daerah yang efektif dalam melayani investor. Sementara, untuk infrastruktur dan tenaga kerja akan menjadi faktor penting yang menjadi fokus perhatian di masa datang. Hal tersebut dapat dipahami mengingat ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan investasi (khususnya swasta) masih sangat terbatas. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang tersedia yang



ditinjau dari sisi kualitas masih sangat jauh tertinggal dibanding tenaga kerja yang ada di luar Selayar, sehingga dikhawatirkan, ketika investasi berjalan ke depan, tenaga kerja yang terserap justru tenaga kerja pendatang yang jauh lebih siap memperebutkan lapangan kerja yang tercipta dari proses investasi.

Dalam kondisi seperti itu, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah justru lebih berorientasi pada APBD dari pada pertumbuhan maupun penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik untuk mengurangnya berupa kebijakan yang berorientasi pada penciptaan usaha yang berskala ekonomi bahkan perlu diupayakan dukungan kerjasama regional agar lebih efisien.

Selain itu, dalam rangka penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, dan militan, maka pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat seharusnya menjadi tujuan utama, bukan hasil dari efek samping. Bersamaan dengan itu, secara simultan dilakukan tata kelola pengeluaran pemerintah daerah yang lebih baik, khususnya investasi publik untuk mendorong investasi, memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan publik, melakukan advokasi ke Pemerintah Pusat agar menyiapkan instrumen insentif fiskal yang lebih banyak, disamping pemerintah daerah sendiri harus lebih kreatif dalam menciptakan instrumen, membangun dan menerapkan sistem dan prosedur perizinan yang lebih transparan serta menempatkan institusi penanaman modal Daerah sebagai promosi dan lembaga koordinasi.

c. Basis Ekonomi dan Sektor Unggulan

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten yang berciri maritim dengan luas wilayah laut 9.146,7 Km² (87,08%), menjadikan Kepulauan Selayar kaya potensi sumberdaya



perikanan dan kelautan. Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kelautan dapat dilakukan melalui kebijakan transformasi struktural.

Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar akan dapat memberikan kontribusi signifikan dan menjadi basis ekonomi daerah ke depan, apabila terbangun pola transformasi struktural sebagaimana digambarkan di atas. Mengingat masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, pada umumnya memiliki budaya agraris, maka transformasi struktural akan dapat diwujudkan apabila secara simultan juga dilakukan transformasi budaya dari budaya agraris (kontinen) ke budaya maritim (Bahari).

Proses ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama, karena pada umumnya, sebuah perubahan orientasi apa lagi berkaitan dengan perubahan kultural, sedikit banyaknya akan menimbulkan riak-riak dan penolakan pada awal prosesnya. Walaupun penolakan yang muncul tidak secara nyata terlihat, namun dalam konteks transformasi budaya dimaksud, perubahan orientasi dari orientasi darat ke orientasi laut memerlukan pula perubahan wawasan, keterampilan dan alih mata pencaharian dari masyarakat Selayar pada umumnya.

Untuk menjamin terlaksananya proses transformasi (baik struktural maupun budaya), kebijakan yang perlu ditempuh, meliputi :

1. Memelihara keunggulan komparatif daerah dan mempercepat proses terbangunnya keunggulan kompetitif melalui penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan.
2. Mempercepat proses alih teknologi, bagi tenaga kerja lokal khususnya mereka yang terserap dan atau akan terserap ke sektor kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi dan produktivitas.
3. Mengontrol keseimbangan struktural pada sektor-sektor startegis seperti sektor energi dan pertambangan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dapat mempengaruhi kelancaran



proses transformasi baik transformasi struktural pada sektor pertanian maupun transformasi budaya melalui pergeseran orientasi lapangan kerja dari sub sektor Pertanian Tanaman Pangan ke sub sektor Kelautan dan Perikanan.

Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan di atas, sekaligus akan menciptakan keunggulan kompetitif, di mana Selayar telah memiliki kemampuan mentransformasikan input menjadi barang dan jasa pada tingkat laba maksimum pada basis yang lestari, lebih baik dari daerah lain yang memiliki ciri dan karakter yang sama (maritim, bahari).

Jelaslah, bahwa produk unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kelautan dan Perikanan, dengan ciri utama keunggulannya, meliputi :

1. Penciptaan nilai tambah yang prospektif.
2. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar.
3. Keterkaitan lintas sektor (*backward* dan *forward linkage*) yang tinggi.

Sumberdaya alam merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan, sangat ditentukan oleh kemampuan segenap stakeholders dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang baik yang memperhatikan aspek keseimbangan dan daya dukung dalam memanfaatkan potensi tersebut, agar dapat berkesinambungan.

Selain itu, sumberdaya alam memberikan peluang bagi manusia untuk bisa tetap bertahan hidup dan melakukan aktivitas produktif bagi kemaslahatan kita semua.

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi sumberdaya alam terutama yang ada pada wilayah darat saat ini, terus menerus mengalami tekanan eksploitasi. Degradasi yang terjadi pada daerah aliran sungai (DAS) membuktikan bahwa telah terjadi eksploitasi secara berlebihan terhadap potensi hutan sehingga



menyebabkan persediaan air tanah menjadi berkurang. Sungai-sungai yang dulu masih dialiri air, kini sebagian besar mengalami kekeringan. Selain karena penebangan hutan, aktivitas tambang bahan galian c juga turut mempercepat kerusakan pada wilayah DAS.

Berdasarkan data statistik, luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2008 adalah 13.681,10 ha. Jika dibandingkan dengan luas hutan pada 5 tahun yang lalu (2004) yaitu 13.788,40, kondisi hutan Selayar semakin menurun baik dilihat dari sisi kualitas, maupun kuantitas. Oleh karena itu, ke depan, kebijakan yang harus ditempuh untuk mengembalikan eksistensi hutan agar dapat berfungsi kembali sebagai penyangga kehidupan adalah melalui gerakan penanaman kembali yang diikuti dengan upaya penyadaran masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan adanya aturan yang jelas yang mengatur tata kelola hutan yang ada, baik hutan rakyat maupun hutan negara.

Pada wilayah laut, potensi sumberdaya alam yang ada dan selama ini telah dikelola oleh masyarakat khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau adalah potensi kelautan dan perikanan. Sekalipun demikian, usaha yang dijalankan oleh masyarakat nelayan belum mampu memberikan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan yang sebanding dengan ketersediaan potensi perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka statistik bahwa dari 20,45% jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar 80% diantaranya adalah mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau.

Kondisi wilayah laut Selayar tidak jauh beda dengan kondisi wilayah yang ada di darat. Aktivitas pemanfaatan potensi wilayah laut yang cenderung tidak ramah lingkungan, mengakibatkan semakin menurunnya kualitas ekosistem laut, antara lain kawasan terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir.



Abrasi pantai yang terus-menerus terjadi pada sebagian wilayah pesisir mengancam eksistensi dan tempat pemukiman manusia. Selain itu, terjadinya penurunan kualitas lingkungan laut tersebut, menyebabkan populasi ikan pun menurun.

Eksplorasi sumberdaya perikanan laut di Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini masih terfokus pada kawasan pesisir, sehingga dalam jangka panjang cenderung menimbulkan *overfishing* di sepanjang kawasan tersebut. Padahal wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kawasan dengan wilayah lautnya lebih luas dibandingkan daratannya, sehingga kemungkinan besar memiliki potensi ikan laut lepas yang sangat tinggi dan memerlukan pengelolaan hasil tangkapan yang optimal guna meningkatkan penghasilan nelayan.

Dengan pengaplikasian sistem penangkapan ikan laut lepas terintegrasi pada skala kecil (pilot project) dipandang dapat memberikan *multiplier effect* secara ekonomi.

Berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup, di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2008 terdapat hutan lindung seluas 6.538,40 ha, hutan produksi seluas 5.662,70 ha dan hutan konservasi seluas 1.500 ha. Di samping itu dalam hamparan laut yang sangat luas terdapat **terumbu karang** dengan segala keindahannya terutama di kawasan Taka Bonerate. Terumbu karang tersebut mempunyai andil yang sangat besar dalam pengembangan sektor pariwisata terutama **wisata bahari**.

Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Moldiva. Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektar, dengan terumbu karang yang tersebar seluas 640 km². Topografi kawasan sangat unik dan menarik, dimana atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan rataaan terumbu yang luas



dan tenggelam, membentuk pulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak. Diantara pulau-pulau gosong karang, terdapat selat-selat sempit yang dalam dan terjal. Sedangkan pada bagian permukaan rata-rata terumbu, banyak terdapat kolam-kolam kecil yang dalam dan dikelilingi oleh terumbu karang. Pada saat air surut terendah, terlihat dengan jelas daratan kering dan diselingi genangan air yang membentuk kolam-kolam kecil.

Tumbuhan yang terdapat di daerah pantai didominasi oleh kelapa (*Cocos nucifera*), pandan laut (*Pandanus sp.*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), dan ketapang (*Terminalia catappa*). Terumbu karang yang sudah teridentifikasi sebanyak 261 jenis dari 17 famili diantaranya *Pocillopora eydouxi*, *Montipora danae*, *Acropora palifera*, *Porites cylindrica*, *Pavona clavus*, *Fungia concinna*, dan lain-lain. Sebagian besar jenis-jenis karang tersebut telah membentuk terumbu karang atol (*barrier reef*) dan terumbu tepi (*fringing reef*). Semuanya merupakan terumbu karang yang indah dan relatif masih utuh. Terdapat sekitar 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis tinggi seperti kerapu (*Epinephelus spp.*), cakalang (*Katsuwonus spp.*), napoleon wrasse (*Cheilinus undulatus*), dan baronang (*Siganus sp.*). Sebanyak 244 jenis moluska diantaranya lola (*Trochus niloticus*), kerang kepala kambing (*Cassis cornuta*), triton (*Charonia tritonis*), batulaga (*Turbo spp.*), kima sisik (*Tridacna squamosa*), kerang mutiara (*Pinctada spp.*), dan nautilus berongga (*Nautilus pompilius*). Jenis-jenis penyu yang tercatat termasuk penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), dan penyu lekang (*Dermochelys coriacea*).

Sebanyak 15 buah pulau di Taman Nasional Taka Bonerate dapat dilakukan kegiatan menyelam, snorkeling dan wisata bahari lainnya.



Pada wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai areal budidaya perikanan karena garis pantainya yang mencapai 670 km. Selain itu, juga terdapat hutan mangrove yang cukup luas sekitar 5000 hektar, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai biota laut yang bernilai ekonomis tinggi.

4. Sosial, Budaya dan Agama

Kabupaten Kepulauan Selayar dihuni oleh berbagai etnik baik lokal maupun pendatang. Selayar merupakan etnik lokal, sedangkan etnik pendatang antara lain : Bugis, Bajo, Buton, dan Etnik Tionghoa. Secara historis, baik etnik lokal, maupun etnik pendatang sudah menyatu sejak Selayar dikenal sehingga pada umumnya, dalam proses interaksi sosial yang terjadi, tidak pernah ditemukan adanya ketegangan antar etnik.

Selain etnik Tionghoa, semua etnik yang ada saat ini, masih memegang teguh adat dan budaya mereka masing-masing. Budaya yang berkembang pada etnik – etnik tersebut, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius (Islam) walaupun sebagian besar masih bersifat tradisional.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi yang juga sudah merambah masyarakat Selayar, nilai-nilai lokal yang dulu dianut dan dijalankan dalam melakukan interaksi sosial, sedikit demi sedikit menjadi pudar bahkan beberapa diantaranya sudah tidak lagi membekas. Nilai-nilai tersebut, antara lain berupa **Panglima Menteng**, yang dulu dipelihara kuat oleh masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan Selayar dan dipraktekkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya laut, sudah tidak ditemukan lagi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Selayar khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan. Nilai-nilai tersebut telah digantikan oleh nilai kapitalisme yang ditandai dengan maraknya aktivitas merusak dalam mengeksploitasi potensi sumberdaya di laut.



Oleh karena itu, dalam rangka menempatkan wilayah laut sebagai tulang punggung ekonomi daerah, nilai-nilai tradisional sebagai produk budaya masa lalu yang umumnya sangat memperhatikan aspek kesinambungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya perlu kembali digali dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Selayar.

Dilihat dari sisi agama, masyarakat Selayar umumnya beragama Islam, kecuali pada masyarakat dengan Etnik Tionghoa, 99% diantaranya menganut agama nasrani. Sekalipun demikian, sepanjang berdirinya Selayar sebagai salah satu Kabupaten yang berotonomi, tidak pernah terjadi konflik sosial yang disebabkan oleh faktor suku, agama, dan ras (SARA).

Dalam bidang kelembagaan, sekalipun beberapa kelembagaan ditemukan tumbuh dan berkembang pada masyarakat Selayar, namun perannya belum dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Kelembagaan dimaksud, juga sifatnya masih sangat tradisional dan merupakan warisan turun temurun dari leluhur. **Rera'** misalnya merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat petani yang bertujuan membantu mempercepat pembukaan lahan pertanian yang dilakukan secara gotong royong, tanpa ada imbalan jasa didalamnya. Semuanya dilakukan atas dasar membantu sesama masyarakat.

Lampareng, juga merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dikenal dalam masyarakat Selayar. Sebagaimana diketahui bahwa sekalipun secara geografis Selayar dikelilingi oleh laut, namun sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor agraris. **Lampareng** sebagai suatu kelembagaan bertujuan membangun kekuatan bersama dalam melaksanakan aktifitas pertanian. Salah satu musuh utama petani di Selayar adalah Babi Hutan. Melalui kelembagaan Lamparang, Babi Hutan dicegah secara bersama sehingga tidak punya peluang menyerang tanaman masyarakat.



Baik *rera'* maupun *lamparang* merupakan dua bentuk kelembagaan yang saat ini sudah jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat petani di Selayar. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kelembagaan tersebut, melemah seiring dengan kerasnya persaingan hidup dan terbatasnya kemampuan lahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelembagaan yang ada saat ini, dibentuk atas prakarsa masyarakat dan lebih berorientasi pada adanya kepentingan yang sama dari para anggotanya. Nilai-nilai yang dikembangkan didalamnya pun tidak menggambarkan ciri khas masyarakat Selayar masa lalu. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri dari pemerintah daerah yang tengah menggalakkan program pemberdayaan masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang pernah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Selayar masa lampau, sampai saat ini, belum terlihat hasilnya secara signifikan. Masyarakat semakin bergantung pada program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan strategis guna mendorong kemandirian masyarakat, sehingga kondisi kehidupan mereka terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat lebih meningkat kualitasnya.

Dampak dari lemahnya kelembagaan masyarakat ini, dapat dilihat dari kondisi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari jumlah penduduk sebesar 117.860 jiwa pada tahun 2008, sekitar 20,45% diantaranya berada dalam kondisi miskin. Selain itu, terjadi pergeseran tenaga kerja (walaupun tidak begitu signifikan) dari sektor pertanian ke sektor bangunan. Pergeseran ini perlu diwaspadai mengingat ekonomi yang dibangun dari sektor bangunan, tidak akan mampu bertahan ketika badai krisis datang. Seperti kasus tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dampak negatifnya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat petani. Justeru komoditas pertanian mereka memiliki nilai jual yang relatif besar karena dinilai dengan kurs dolar yang beredar saat itu.



5. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Selayar masih ditandai dengan rendahnya aksesibilitas, kualitas ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah.

Pengembangan prasarana penampung air, seperti bendungan, embung dan sebagainya masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, maupun industri terutama pada musim kering. Bahkan pada beberapa desa masih banyak yang belum dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

Di bidang sarana/ prasarana energi termasuk kelistrikan, masih banyak penduduk yang belum terjangkau pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hingga tahun 2008, dari jumlah 33.363 rumah tangga, yang tercatat sebagai pelanggan PLN baru mencapai 10.568 rumah tangga atau sekitar 31,68 %. Mereka tersebar pada tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Pasimasunggu. Sementara empat kecamatan lainnya yaitu kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan Kecamatan Taka Bonerate belum terjangkau jaringan listrik berbasis PLN, tetapi telah mempunyai jaringan listrik swasta yang dikelola oleh PD. Berdikari atau Perusahaan Listrik Desa (PLD) dengan kapasitas sangat terbatas.

Pengembangan prasarana jalan dan jembatan masih belum memadai. Beberapa desa di kecamatan yang ada di Kepulauan belum memiliki jalan yang representative dalam rangka kelancaran transportasi, baik dalam desa itu sendiri maupun untuk mengakses ke desa lain / antar desa dan kecamatan.



Pengembangan sarana / prasarana perhubungan masih perlu ditingkatkan. Bandara yang ada sekarang belum sepenuhnya menjamin kelancaran transportasi udara karena kapasitasnya yang masih sangat rendah sehingga belum banyak perusahaan jasa penerbangan yang melirik Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu jalur penerbangan. Demikian pula halnya dengan sarana / prasarana perhubungan laut masih perlu ditingkatkan agar Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan dapat menjadi salah satu tempat transit kapal Pelni.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengusahakan secara bertahap komputersasi proses administrasi perkantoran dan membangun system informasi melalui *e-government*, namun usaha ini belum maksimal karena belum termanfaatkan secara baik. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya administrasi pemerintahan yang dijalankan khususnya dalam menjawab tantangan perubahan dan perkembangan permasalahan yang semakin kompleks.

6. Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merubah paradigma pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi. Perubahan ini memberi kesempatan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini juga sekaligus menuntut daerah untuk lebih profesional dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memberi penegasan antara fungsi pemerintah daerah yang merupakan badan eksekutif dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan badan legislative daerah. Adanya ketegasan fungsi dari kedua lembaga ini sangat bermanfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, sehingga *check and balances* dapat diterapkan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni pemerintahan yang adil, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Hingga tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sebanyak 3.607 orang, PNS Instansi Vertikal sebanyak 379 orang. Komponen pegawai yang terbesar diantaranya adalah tenaga pendidik atau guru. Kendala terbesar yang dihadapi adalah mutu/ kualitas aparatur. Oleh karena itu, pemberdayaan PNS perlu mendapat perhatian termasuk aspek keahlian dan kesejahteraannya.

Dilihat dari aspek kuantitas, jumlah sumberdaya aparatur yang dimiliki Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar masih terbelang standar dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun dilihat dari aspek kualitas, yakni dengan menggunakan tolak ukur kualifikasi pendidikan formal dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya, maka kualifikasi aparatur Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan. Selain faktor kuantitas dan kualitas tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah distribusi sumber daya aparatur sesuai dengan beban kerja masing-masing unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Belum optimalnya analisis jenis dan beban kerja, menyebabkan masih adanya penempatan aparatur yang kurang sesuai dengan kualifikasi yang di miliki, serta distribusi yang relative tidak seimbang antara jumlah sumberdaya aparatur dengan beban kerja unit organisasi bersangkutan, sehingga masih didapatkan kondisi yang tidak efisien di lingkungan organisasi



Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika masalah ini dapat diatasi dengan baik, maka pencapaian kinerja organisasi akan lebih tinggi.

7. Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempercepat pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka wilayah ini dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah Pengembangan (SWP), Sub-sub Wilayah Kecil, dan Pengembangan Kota Benteng. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan pendekatan pembangunan regional (wilayah) yang diikuti dengan program pengembangan komoditas tertentu, sebagai berikut :

- a. Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I) bagian utara dengan pusat pengembangan di Batangmata, meliputi Kecamatan Bontomatene dan Bontomanai serta sebagian desa/ kelurahan di daerah tersebut. Usaha yang dikembangkan adalah peternakan.
- b. Sub Wilayah Pembangunan II (SWP II) bagian tengah dengan pusat pembangunan di Benteng, meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, dan Bontosikuyu. Kegiatan usaha yang akan dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan industri kerajinan.
- c. Sub Wilayah Pembangunan III (SWP III) bagian selatan dengan pusat pengembangan di Ujung Jampea, meliputi Kecamatan Pasimasunggu Timur, Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Pada wilayah ini akan dikembangkan perikanan, industri maritim, hasil hutan meliputi beberapa tanaman perkebunan, dan tanaman pangan.
- d. Sub-sub Wilayah Kecil, yakni pembangunan kampung/ dusun yang dihuni penduduk sekitar 30 – 40 rumah tangga.
- e. Pengembangan Benteng sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Dalam rangka



efektifitas penataan dan penertiban kota, dilakukan pembenahan tata ruang yang mencakup penentuan kompleks pasar, pusat pemukiman, perkantoran, lokasi pendidikan dan sebagainya.

Sementara itu, arahan kebijakan pengembangan struktur tata ruang dan jaringan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2008 terbagi atas 10 pusat pertumbuhan. Masing-masing pusat pertumbuhan terbagi atas wilayah yang lebih kecil yang disebut Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang meliputi beberapa desa dengan salah satu desa yang paling maju dan strategis dijadikan sebagai SKP yang meliputi beberapa desa dengan salah satu desa paling maju dan strategis dijadikan sebagai SP. Pusat pusat pertumbuhan tersebut adalah:

- a. Pusat Pertumbuhan Batangmata, meliputi Kec. Bontomatene;
- b. Pusat Pertumbuhan Polebunging, meliputi Kec. Bontomanai;
- c. Pusat Pertumbuhan Benteng meliputi Kec. Benteng;
- d. Pusat Pertumbuhan Matalalang meliputi Kec. Bontoharu;
- e. Pusat Pertumbuhan Pariangan meliputi Kec. Bontosikuyu;
- f. Pusat Pertumbuhan Kayuadi meliputi Kec. Taka Bonerate;
- g. Pusat Pertumbuhan Ujung meliputi Kec. Pasimasunggu Timur;
- h. Pusat Pertumbuhan Benteng Jamea meliputi Kec. Pasimasunggu;
- i. Pusat Pertumbuhan Bonerate meliputi Kec. Pasimarannu;
- j. Pusat Pertumbuhan Kalaotoa meliputi Kec. Pasilambena.

Sub wilayah pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan daerah memiliki peran yang strategis sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Setiap sub wilayah mempunyai peran sebagai mitra sejajar yang membutuhkan kerjasama yang harmonis dalam rangka membangun sinergitas pembangunan antar sub wilayah. Dengan demikian pembangunan sub wilayah akan mendukung dan memberi kontribusi terhadap pengembangan sub wilayah lainnya serta saling memperkuat antara sub wilayah yang satu dengan sub wilayah lainnya.



B. Analisis Isu – Isu Strategis

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Sesuai kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari sejumlah pulau kecil, maka Kabupaten Kepulauan Selayar diperhadapkan pada beberapa permasalahan :

- a. Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak dan mengutamakan aspek eksploitasi tanpa mempertimbangkan akibatnya bahkan mengabaikan fungsi konservasi.
- b. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengawatirkan akibat banyaknya praktek penebangan / pembalakan liar (*illegal logging*)
- c. Tingginya tekanan eksploitasi potensi sumber daya perikanan di wilayah perairan pesisir serta penggunaan bom dan busur (*illegal Fishing*) yang relative tinggi menyebabkan menurunnya populasi ikan dan biota laut lainnya.
- d. Kebutuhan atas pembangunan infrastruktur terutama air bersih, listrik dan jalan serta infrastruktur lainnya masih banyak yang belum dapat terpenuhi terutama di wilayah kecamatan kepulauan.
- e. Sumber daya Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain, adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan.
- f. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan yang terstruktur dan terintegrasi



2. Demografi

Struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang didominasi oleh usia tenaga kerja, di satu sisi merupakan peluang bagi tumbuhnya investasi daerah. Namun di sisi lain, kondisi ini justru dapat menjadi tantangan apabila penduduk dengan usia kerja tersebut, tidak dibarengi dengan kemampuan dan skill yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Penduduk dalam dimensi sumberdaya manusia merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Komponen ini merupakan faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan kependudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, beberapa isu strategis dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2008 masih relatif tinggi yaitu 5.980 orang atau 14,72 % dari 62.803 orang jumlah angkatan kerja.
- b. Konsentrasi penduduk yang lebih besar di wilayah bagian kota mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan semakin tinggi sedangkan lahan pemukiman sangat terbatas.
- c. Secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2007 baru mencapai 67,39. Kondisi yang demikian masih berada di bawah IPM Sulawesi Selatan yang mencapai 69,40 pada tahun yang sama.
- d. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2007 baru mencapai 67,20 tahun, sedangkan angka harapan hidup Sulawesi Selatan telah mencapai 69,40 pada tahun yang sama.
- e. Dukungan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat belum memadai terutama transportasi, ketenagalistrikan, dan sumberdaya air.



3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Pada bidang ekonomi dan sumberdaya alam, beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, meliputi :

- a. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar.
- b. Kualitas sumberdaya manusia, baik sumberdaya manusia aparatur, swasta, maupun masyarakat masih rendah.
- c. Dukungan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat belum memadai.
- d. Belum menguatnya kelembagaan politik, lembaga pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan, serta lemahnya penegakan hukum.
- e. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup belum sepenuhnya berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- f. Kualitas pelayanan umum kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah dirasakan masih rendah.

4. Sosial, Budaya dan Agama dan Politik

Pada umumnya budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini, dalam melakukan usaha ekonomi, masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (*subsisten*), jadi belum berorientasi pada pasar (*market oriented*).

Terdapat beberapa kendala utama dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama potensi kelautan dan perikanan, yaitu ; (a) kemampuan teknologi, (b) kualitas sumberdaya manusia (SDM), (c) koordinasi dan sinkronisasi program kelembagaan, (d) belum terciptanya iklim yang kondusif dan (e) infrastruktur pendukung yang masih terbatas. Di bidang teknologi, masih dihadapkan pada keterbatasan untuk menyediakan teknologi yang tepat guna dan



memberikan nilai tambah yang signifikan dan siap digunakan (*instant*). Hal demikian menyebabkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasar komoditas mentah. Hal ini berdampak pada masih rendahnya produktivitas, efisiensi dan pendapatan relatif masyarakat Selayar terutama mereka yang bergerak di sektor pertanian.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar di era industrialisasi dan perdagangan bebas menuntut penguatan usaha masyarakat agar berskala ekonomi melalui model-model baru. Model pembangunan dengan paradigma modernisasi yang secara praksis terlihat melalui revolusi hijau ternyata hanya mampu mendongkrak tingkat produksi. Sementara kesenjangan sosial ekonomi masih tampak besar. Paradigma percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dikembangkan ke depan, harus secara jeli mempertimbangkan aspek budaya dan struktur sosial sehingga benar-benar menjadi alternatif bagi model perkuatan ekonomi daerah masa depan.

Di balik tantangan yang dihadapi dalam mempercepat pembangunan Selayar dalam kurun waktu 2005-2025, terdapat berbagai peluang yang sangat menjanjikan untuk mendukung upaya tersebut. *Pertama*, memanfaatkan dampak positif penurunan nilai tukar rupiah; *Kedua*, keinginan dunia usaha yang semakin meningkat untuk menanamkan modal di bidang agrobisnis dan agroindustri. *Ketiga*, kurang berpengaruhnya permintaan dunia produk pertanian seiring dengan semakin merosotnya harga komoditas pertanian. *Keempat*, meningkatnya semangat daerah untuk mengembangkan teknologi tepat guna dan *kelima*, terjadinya demokratisasi, redistribusi aset, pemihakan kepada masyarakat bawah yang semakin tinggi, yang didukung semangat, integritas, dan daya tahan pelaku ekonomi yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang perlu mendapat perhatian di bidang sosial, budaya, dan politik dalam 20 tahun ke depan adalah :



- a. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup tinggi. Hingga tahun 2008 terdapat 31.556 penduduk miskin atau 7.889 kepala keluarga.
- b. Adanya kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan khususnya di pulau-pulau kecil dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- c. Rendahnya mutu pendidikan secara umum disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal terutama diwaliki oleh efektifitas proses belajar mengajar.
- d. Kondisi sarana sekolah yang perlu diperbaiki
- e. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
- f. Secara fisik, persebaran sarana kesehatan baik Puskesmas maupun Pustu serta sarana kesehatan lainnya belum merata ke seluruh wilayah
- g. Upaya untuk membangun kualitas hidup beragama dan spiritualitas, seperti ajaran tentang etos kerja, disiplin, penghargaan terhadap prestasi kerja, dan sebagainya belum seluruhnya berhasil.



BAB III

VISI DAN MISI DAERAH

A. VISI PEMBANGUNAN

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 20 tahun ke depan, memperhitungkan potensi dan kemampuan daerah serta berbagai faktor strategis lainnya, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 adalah :

**“SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN MARITIM, TERDEPAN,
MAPAN, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN ”**

Visi pembangunan daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Selayar yang secara geografis didominasi oleh wilayah laut. Disamping itu, Visi tersebut diatas memberikan gambaran tentang adanya keinginan yang kuat baik secara politik maupun secara historis dari pemerintah dan masyarakat Selayar untuk menjadikan laut sebagai titik tumpu perekonomian daerah ke depan.

Kabupaten maritim bermakna bahwa potensi kemaritiman akan dijadikan sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah yang menunjang peningkatan ekonomi provinsi dan nasional. Kondisi yang ingin dicapai antara lain Selayar muncul sebagai satu kekuatan ekonomi baru di Kawasan Sulawesi Selatan yang dapat menunjang peningkatan devisa negara. Dalam kaitan ini, maka ketersediaan infrastruktur perhubungan laut, jasa kepelabuhanan, berkembangnya industri perikanan dan terjaminnya keamanan di laut dalam waktu bersamaan, Kepulauan Selayar menjadi Pusat Kunjungan Wisata Bahari menjadi sesuatu yang niscaya.



Terdepan bermakna bahwa pemerintah kabupaten menjadi teladan dalam penerapan praktek pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum didukung oleh kualitas SDM yang mampu mengelola potensi maritim secara optimal. Dalam kaitan ini SDM sebagai modal dasar pembangunan harus didukung oleh peran lembaga pendidikan dan kualitas kesehatan yang optimal, sehingga Selayar menjadi “*best practice*” dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kondisi yang ingin dicapai adalah terciptanya kualitas SDM yang mampu menciptakan terobosan dan pembaharuan dalam aspek pemerintahan maupun usaha ekonomi berskala bisnis berbasis sumberdaya kemaritiman dengan semangat keagamaan dan penguasaan IPTEK, sehingga Selayar dapat merebut kembali peran historisnya.

Mapan bermakna bahwa adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi yang ingin dicapai adalah : (a) meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; (b) meningkatnya PAD; (c) semakin terbukanya lapangan pekerjaan secara luas; (d) semakin menurunnya pengangguran; (e) angka kemiskinan yang semakin kecil.

Mandiri bermakna bahwa adanya kemampuan menghadapi tantangan dan hambatan dalam proses pemenuhan kebutuhan daerah. Kondisi yang ingin dicapai adalah : (a) tersedianya infrastruktur dasar secara memadai; (b) semakin membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (c) menguatnya kelembagaan pemerintah dan masyarakat

Berkelanjutan bermakna adanya kemampuan adaptasi yang menjamin akselerasi dan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian potensi sumberdaya. Selain itu, berkelanjutan juga bermakna bahwa pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.



Kondisi yang ingin dicapai adalah : (a) terpeliharanya sumber-sumber air; (b) semakin membaiknya fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan; (c) meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan; (d) adanya kesadaran menyeluruh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan baik di darat maupun di laut.

B. MISI PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kemaritiman;
Dalam arti ; pembangunan Selayar bertumpu pada potensi kemaritiman dan menjadi sumber utama PAD yang mendukung perekonomian daerah, regional maupun nasional.
- b. Meningkatkan kualitas SDM
Dalam arti ; masyarakat mampu membuka lapangan kerja baru dan mengisi lapangan kerja yang tersedia; sedang SDM aparat mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*best practice*) sehingga menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan berciri maritim.
- c. Mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah
Dalam arti ; Selayar menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan kompetitif yang diperhitungkan, baik skala propinsi maupun nasional serta mampu mengatasi permasalahan daerah melalui pembangunan di segala bidang.
- d. Melestarikan fungsi lingkungan hidup
Dalam arti ; mempertahankan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berimbang dengan upaya pelestariannya.



C. NILAI – NILAI

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini, didasarkan pada nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta diterapkan dalam masyarakat Selayar selama ini.

Nilai-nilai tersebut antara lain :

- a. ***Tappa' ri Alla Ta' ala***, artinya **percaya** akan adanya Tuhan Yang Maha Melihat dan Mengetahui sehingga para pelaku pembangunan, baik Pemerintah Kabupaten, kalangan swasta, maupun masyarakat pada umumnya, senantiasa mendasarkan tindakan, perkataan dan perbuatannya pada nilai-nilai keagamaan.
- b. ***'Kontu Toje'***, artinya **konsisten dan konsekwen** dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama.
- c. ***Ssamaturu***, artinya dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama senantiasa mengandalkan **kekuatan tim kerja** (team work).
- d. ***Siri'***, artinya setiap orang akan **merasa malu** jika tidak bisa berperilaku, bekerja, dan memperoleh hasil yang baik seperti yang dilakukan orang lain, dan **malu** jika berbuat kebohongan, tidak jujur, dan melanggar aturan agama, aturan pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- e. ***Ssipakatau***, artinya saling menghargai dan saling **menghormati perbedaan pendapat** berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang tidak dipengaruhi oleh strata sosial dalam kehidupan masyarakat.
- f. ***'Bulo Sibatang - 'Munte Sibatu***, artinya taat dan patuh serta menjunjung tinggi kesepakatan dari hasil **musyawarah**.



BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan harapan dan kondisi yang ingin dicapai dan cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai kondisi tersebut, sebagaimana dirumuskan dalam visi dan misi pembangunan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dijabarkan lebih lanjut arah kebijakan dan sasaran pokok, sebagai berikut :

Misi 1 : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kemaritiman

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan potensi sumberdaya kemaritiman secara optimal yang ditandai oleh 4 sukses pembangunan kemaritiman yang meliputi sukses perhubungan laut, sukses sarana dan prasarana kemaritiman, unggul diproduksi dan komoditi serta unggul dikeamanan laut yang berimplikasi terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perekonomian daerah.

Arah Kebijakan 1 : Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai faktor utama untuk pembangunan, dengan bidang terkait meliputi:

1. Bidang Perikanan dan Kelautan diarahkan pada:
 - a. Mengupayakan terbangunnya sistem pengelolaan kelautan dan perikanan yang sesuai pembangunan kemaritiman;
 - b. Mengupayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir termasuk dalam aspek pengawasan dan pengendalian, meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, serta peningkatan kualitas, kuantitas serta produksi perikanan dan kelautan.



2. Bidang Pariwisata diarahkan pada:
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata bahari dengan didukung oleh pariwisata budaya.
 - b. Pengembangan pemasaran dan kemitraan pariwisata daerah serta penyiapan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - c. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan kepariwisataan.
3. Bidang Perhubungan diarahkan pada :
 - a. Mewujudkan Kepulauan Selayar sebagai bagian dari Sistem Transportasi Nasional, dengan menjadikan :
 - Pelabuhan Laut Pammatata sebagai simpul transportasi laut nasional;
 - Bandara Aroepala sebagai simpul transportasi udara nasional;
 - Selayar sebagai jalur transportasi darat nasional.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil khususnya wilayah kepulauan ;
 - c. Meningkatkan sarana informasi dan komunikasi agar dapat terakses oleh masyarakat lokal, nasional maupun internasional;
 - d. Mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informasi daerah sehingga mendukung dan memiliki saling keterkaitan dengan sistem komunikasi dan informasi nasional.
4. Bidang Pekerjaan Umum diarahkan pada :
 - a. Upaya untuk mendukung pembangunan kemaritiman
 - b. Membangun pusat kawasan kemaritiman dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal;
 - c. Membangun sarana dan prasarana penunjang wisata kemaritiman;
5. Bidang Kehutanan diarahkan pada upaya:
 - a. Mengembangkan dan melestarikan potensi hutan;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman hayati dan non hayati di kawasan wisata bahari.



6. Bidang Sosial ekonomi diarahkan pada upaya untuk :
 - a. Mendorong kepedulian masyarakat terhadap kondisi spesifik daerah;
 - b. Mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi kemaritiman;
 - c. Penguatan kelembagaan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan sumberdaya manusia untuk dapat berperan mengelola potensi kemaritiman, dengan bidang terkait :

1. Bidang Pendidikan diarahkan pada:
 - a. Mengupayakan peningkatan kompetensi melalui penataan dan peningkatan peran lembaga pendidikan sebagai salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia serta pemahaman nilai-nilai budaya yang ramah lingkungan;
 - b. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kemaritiman agar dapat diketahui secara luas.

Arah Kebijakan 3 : Mengupayakan terjadinya perubahan paradigma (agraris menjadi bahari), dengan bidang terkait:

1. Bidang Sosial budaya diarahkan pada upaya:
 - a. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkait dengan aktualisasi kemaritiman;
 - b. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat adat dan komunitas lainnya sehingga terbangun kolaborasi ;
 - c. Memelihara kelestarian budaya yang telah terbentuk dan menduplikasikannya ke wilayah lain.



Misi 2 : **Meningkatkan Kualitas SDM**

Sasaran : Terwujudnya SDM Bahari yang berkualitas.

Arah Kebijakan 1 : Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan bidang terkait, meliputi :

1. Bidang Aparatur diarahkan pada:
 - a. Mengupayakan peningkatan kompetensi aparatur guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan adil;
 - b. Mengupayakan terciptanya kelembagaan aparatur yang efektif dan efisien.
2. Pelayanan Publik diarahkan pada upaya:
 - a. Menerapkan sistem pelayanan publik secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
 - b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perbaikan pelayanan;

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan kualitas SDM Masyarakat bahari, dengan bidang terkait:

1. Bidang Pendidikan diarahkan pada :
 - a. Mengupayakan peningkatan kompetensi melalui penataan dan peningkatan peran lembaga pendidikan sebagai salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia serta pemahaman nilai-nilai budaya yang ramah lingkungan;
 - b. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kemaritiman agar dapat diketahui secara luas

Arah Kebijakan 3 : Memperkuat otonomi desa, dengan bidang terkait:

1. Bidang Aparatur yang diarahkan pada:
 - a. Mengupayakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa ;
 - b. Mengupayakan kemampuan keuangan desa



2. Sosial budaya yang diarahkan pada:
 - a. Mengupayakan tumbuhnya swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
 - b. Menciptakan sinergitas antar desa

Misi 3 : **Mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah**

Ketertinggalan Selayar dengan daerah lain baik dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional hanya dapat diatasi apabila Selayar mengembangkan daya saing dan melaksanakan pembangunan berbasis kemandirian.

- Sasaran** :
1. Terwujudnya daya saing daerah ditandai dengan; menguatnya kelembagaan pemerintah dan masyarakat, semakin membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat;
 2. Terwujudnya kemandirian daerah yang ditandai dengan; meningkatnya PAD; semakin terbukanya lapangan pekerjaan secara luas yang disertai dengan semakin menurunnya pengangguran; tersedianya infrastruktur dasar secara memadai.

- Arah Kebijakan 1** : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja baik lokal, regional maupun nasional, dengan bidang terkait meliputi:
- a. Bidang Tenaga Kerja diarahkan pada upaya optimalisasi Balai Latihan Kerja yang mampu menyiapkan tenaga kerja lokal yang handal sesuai kebutuhan pangsa pasar tenaga kerja.



- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada upaya membangun kelembagaan masyarakat agar mampu berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan berbasis sumberdaya lokal.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada upaya mengembangkan peran kaum perempuan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kodratnya.

Arah Kebijakan 2 : Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Pendapatan Lain-lain yang Sah;
 4. Keuntungan dari BUMD;
 5. Sewa Barang dan Jasa Milik Daerah
- dengan bidang terkait meliputi:

- a. Bidang Perhubungan diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor perhubungan.
- b. Bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor kelautan dan perikanan.
- c. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor Pariwisata Seni dan Budaya.
- d. Bidang Perdagangan diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor perdagangan.
- e. Bidang Perindustrian diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor perindustrian.



- f. Bidang Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor koperasi dan UKM.
- g. Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor pendapatan pengelolaan keuangan, dan asset daerah.
- h. Bidang Penanaman Modal diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor penanaman modal
- i. Bidang pertanian dan kehutanan diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor pertanian dan kehutanan.
- j. Bidang pekerjaan umum diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor pekerjaan umum
- k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajerial dalam pengelolaan sumber-sumber PAD di sektor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Arah Kebijakan 3 : Menyediakan infrastruktur dasar masyarakat secara layak dan memadai yang meliputi jalan, jembatan, listrik, air dan telekomunikasi, dengan bidang terkait meliputi:

- a. Bidang Binamarga diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan secara komprehensif termasuk peningkatan jalan ruas, perintisan dan pemeliharaan yang lebih representatif.



- b. Bidang Cipta Karya diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan permukiman yang lebih representatif.
- c. Bidang Ketenagalistrikan diarahkan pada upaya membangun listrik interkoneksi antar wilayah dalam kabupaten dan dengan Sulawesi Selatan.
- d. Bidang Telekomunikasi diarahkan pada upaya meningkatkan sistem jaringan komunikasi

Arah Kebijakan 4 : Mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat, dengan bidang terkait meliputi:

- a. Bidang Ekonomi diarahkan pada upaya meningkatkan sinergitas antar pelaku ekonomi, serta mendorong kemampuan adaptasi terhadap dinamika perekonomian, mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi modern, organisasi usaha dan kelompok produktif masyarakat
- b. Bidang UMKM diarahkan pada upaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk ekonomi syariah
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada upaya mengoptimalkan upaya pemberdayaan dan pengembangan interkoneksi antara lembaga sosial-ekonomi yang ada di masyarakat

Arah Kebijakan 5 : Mengintegrasikan kerjasama fungsional antara pemerintah kabupaten dan masyarakat termasuk swasta (*Good Cooperate Governance*), dengan bidang terkait meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan pemerintah kabupaten yang lebih fokus pada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan , Meningkatkan integritas tiga pilar penyelenggara pemerintahan yakni pemerintah, masyarakat dan swasta yang berorientasi pada sistem swakelola dan privatisasi BUMD



- b. Bidang Hukum diarahkan pada upaya mengembangkan berbagai produk hukum dan regulasi guna mendukung kemandirian daerah.

Misi 4 : Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup

- Sasaran** :
1. Terpeliharanya sumber-sumber air yang ditandai dengan meningkatnya persediaan air baku dan air tanah;
 2. semakin membaiknya fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan ;
 3. meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan;

Arah kebijakan 1 : Merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan bidang terkait, meliputi :

- a. Bidang Pekerjaan Umum diarahkan pada upaya konservasi sumberdaya air melalui pembangunan tanggul vegetasi pada DAS.
- b. Bidang Pertanian diarahkan pada upaya penerapan sistem pertanian yang mengintegrasikan antara pemanfaatan lahan dengan rehabilitasi lahan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada upaya penyadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan konservasi sumberdaya air
- d. Bidang Lingkungan Hidup diarahkan pada upaya penataan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan jasa lingkungan dengan pelestariannya.

Arah kebijakan 2 : Mengembalikan fungsi hutan, dengan bidang terkait, meliputi :

- a. Bidang Kehutanan diarahkan pada upaya merehabilitasi lahan kritis melalui penanaman Hutan Endemik Selayar.



- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada upaya menggalang partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif pada upaya-upaya konservasi hutan dan lahan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada upaya penguatan peran kaum perempuan agar mampu berperan aktif dalam berbagai kegiatan rehabilitasi kawasan hutan.
- d. Bidang Penataan Ruang diarahkan pada upaya penataan kembali kawasan hutan lindung dan hutan rakyat serta hutan produksi.
- e. Bidang Lingkungan Hidup diarahkan pada upaya penyusunan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan 3 : Membebaskan lahan pada lokasi sumber mata air, dengan bidang terkait, meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan diarahkan pada upaya peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan lahan pada lokasi sumber mata air.
- b. Bidang Pekerjaan Umum diarahkan pada upaya identifikasi dan inventarisasi lokasi-lokasi potensi dan sumber mata air.
- c. Bidang Lingkungan Hidup diarahkan pada upaya penilaian kualitas sumberdaya air baku pada lokasi sumber mata air.

Arah kebijakan 4 : Mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan, dengan bidang terkait, meliputi :

- a. Bidang Pariwisata diarahkan pada upaya penyusunan Sistem pengelolaan pariwisata berbasis ekologi lingkungan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan berbasis lingkungan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada upaya peningkatan peran kaum perempuan dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan.



Arah kebijakan 5 : Mengembangkan potensi sumberdaya energi terbarukan, dengan bidang terkait, meliputi :

- a. Bidang pertambangan diarahkan pada upaya penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan

B. Peran Sub Wilayah Pembangunan di Daerah

Peran Pengembangan Sub Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan skenario pengembangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan program pembangunan jangka panjang yang direncanakan. Berdasarkan skenario dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, pengembangan wilayah dibagi dalam dua bagian, yaitu :

Skenario pengembangan pertama, pemanfaatan ruang akan menitikberatkan pada pembangunan pariwisata dan kelautan sebagai pemicu utama pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan akan menjadi arti penting secara regional dan nasional, karena adanya Taman Laut Nasional Takabonerate, industri perkapalan perikanan, serta potensi kelautan dari pulau-pulau sekitarnya.

Skenario pengembangan kedua, pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Selayar bukan saja menitikberatkan pada pembangunan pariwisata, perikanan dan kelautan, akan tetapi juga pada pembangunan industri hilir yang berorientasi ekspor agroindustri dan agrobisnis yang berpotensi dari hasil-hasil perikanan dan kelautan, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan buah-buahan, hasil-hasil perkebunan dan kehutanan, serta dalam rangka pembangunan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan.

Kaitannya dengan RTRW yang ada, dari 10 sub wilayah (10 kecamatan) yang diidentifikasi sebagai sub wilayah pengembangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, menunjukkan bahwa Kecamatan Benteng merupakan sub wilayah dalam Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai



fungsi pelayanan utama, khususnya dalam pelayanan pemerintahan, pemukiman, perdagangan, pendidikan, transportasi, kesehatan, hiburan dan rekreasi, telekomunikasi dan informasi. Kondisi ini, menjadikan Kecamatan Benteng, yang sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, mempunyai hirarki tertinggi dalam sistem pelayanan wilayah. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan pada masa yang akan datang, menghindari pemusatan kegiatan pada suatu kawasan tertentu dan menghindari kemampuan daya dukung wilayah, upaya peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan pada setiap sub wilayah mutlak dilakukan. Berdasarkan strategi pengembangan, kriteria kawasan, dan daya dukung lingkungan, dirumuskan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan industri hilir (depo BBM dan jasa kepelabuhanan) di Kecamatan Bontomatene, meliputi Desa Menara Indah, Pamatata dan Bungaiya.
2. Pengembangan kawasan agroindustri di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontosikuyu.
3. Pengembangan kawasan pusat pengembangan dan permukiman di Kecamatan Bontoharu serta pusat kecamatan dan pusat-pusat permukiman di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontoharu yang berlokasi di sepanjang koridor pesisir, serta beberapa pulau-pulau kecil yang terletak di Kecamatan Taka Bonerate, Pasimasunggu, Pasimarannu dan Pasilambena.
5. Pengembangan kawasan industri kelautan dan industri perahu di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.



6. Pengembangan kawasan industri pariwisata di Kecamatan Takabonerate, serta beberapa wisata khusus di Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu, meliputi Desa Lowa, Appatana dan Desa Lantibongan, maupun wisata pantai yang tersebar di pulau-pulau kecil lainnya
7. Pengembangan kawasan Bandara Padang di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
8. Pengembangan kawasan pelabuhan laut di Pamatata, Benteng, Appatana, Patumbukang, Kayuadi, Pulau Jampea, Bonerate dan Kalaotoa.

Selain yang terkait pelayanan diatas, rencana pengembangan wilayah dalam RTRW juga erat kaitannya dengan sistem pusat pelayanan. Sub-sub wilayah kecamatan tersebut, berperan sebagai kota orde pertama, kedua, ketiga, dan keempat menjadi pusat pelayanan/kegiatan, dengan skala pelayanan tertentu sesuai dengan tingkatannya, meliputi: Kota orde pertama (Benteng) berperan sebagai pusat sub wilayah pengembangan bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, pusat wilayah pengembangan, berperan sebagai pusat pertumbuhan untuk seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Cakupan wilayah pelayanannya, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Kota orde kedua (Batangmata, Bontobangun) yang berperan sebagai pusat satuan kawasan pengembangan merupakan pusat pertumbuhan untuk satuan kawasan pengembangan yang bersangkutan. Kota orde ketiga (Polebungin, Jampea, Pariangan) dan kota orde keempat (Bonerate, Batang, Kalotoa dan Ujung Jampea) merupakan pusat pelayanan lokal kecamatan dan juga pusat pemerintahan wilayah kecamatan dan pusat pelayanan sosial dan ekonomi untuk wilayah bersangkutan.



Selain berfungsi utama, semua kota-kota dalam hirarki tersebut mempunyai peran sebagai fungsi sekunder atau fungsi penunjang yang dimaksudkan sebagai pelengkap fungsi pelayanan yang diembannya guna mendorong dan memacu peran fungsi pelayanan utama. Fungsi sekunder dan fungsi penunjangnya meliputi:

1. Kota orde pertama (Benteng) peran fungsi penunjang yang diberikan sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayah, yang meliputi: Perdagangan regional, Sistem transportasi regional terpadu (darat, laut, dan udara), Sistem pengolahan perikanan terpadu, Industri jasa kemaritiman, Jasa kepariwisataan, Jasa kepelabuhanan, Permukiman, Agroindustri dan agrobisnis dan Pengolahan hasil-hasil perkebunan dan hutan.
2. Kota orde kedua, peran fungsi penunjangnya, antara lain: Perdagangan lokal, Transportasi lokal, Kawasan KINAK, Kawasan industri hilir, Jasa kepariwisataan, Perikanan darat, Jasa kepelabuhanan dan Permukiman.
3. Kota orde ketiga, peran fungsi penunjangnya, antara lain: Industri kecil rakyat, Hasil-hasil pertanian, Hasil-hasil perkebunan, Jasa kepelabuhanan, Jasa kepariwisataan dan Permukiman.
4. Kota orde keempat, peran fungsi penunjangnya, antara lain: Industri perahu, Perikanan laut, Permukiman dan Jasa kepelabuhanan.

C. Tahapan dan Skala Prioritas

Dalam rangka menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka RPJPD 2005 – 2025 ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, meliputi :



1. RPJM Pertama (2005 – 2010)

Pelaksanaan tahap pertama RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2005 – 2025 difokuskan pada penataan kelembagaan daerah dan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan prima, memahami visi pembangunan daerah 20 tahun ke depan, serta mengerti dan kompeten dalam meletakkan dasar-dasar untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut.

Selain itu, pada tahap pertama ini juga, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah harus memperjuangkan batas wilayah dan perubahan nama daerah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah kepulauan dengan luas wilayah laut jauh lebih besar dibandingkan luas wilayah daratnya, sehingga biaya untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas pemerintahan relatif sangat besar dibandingkan dengan daerah lain yang berciri kontinen. Diharapkan melalui penentuan batas tersebut serta perubahan nama Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kabupaten Maritim Selayar, perhatian pemerintah provinsi maupun pusat terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar akan semakin besar, dengan demikian alokasi anggaran untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah semakin ditingkatkan. Pada saat yang bersamaan penataan administrasi keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian sudah harus diupayakan, disertai pembenahan berbagai regulasi dan upaya-upaya awal peningkatan pengawasan.

Selanjutnya, pada sisi masyarakat, pemerintah daerah akan mengupayakan terjadinya transformasi budaya dari budaya kontinen ke budaya bahari melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau, alih teknologi di bidang kelautan dan perikanan, serta pembukaan sektor-sektor baru yang dapat mendukung kelangsungan pengelolaan potensi kemaritiman.



2. RPJM Kedua (2010 – 2015)

Pada tahap kedua, pembangunan daerah akan diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dengan penyediaan infrastruktur untuk menunjang pengelolaan perikanan yang dititikberatkan pada budidaya laut dan pengelolaan pariwisata yang dititikberatkan pada pariwisata bahari dengan ditunjang pariwisata budaya.

Seiring dengan semakin menguatnya kelembagaan masyarakat khususnya mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya di laut, serta berhasilnya proses transformasi budaya dari budaya kontinen ke budaya bahari, maka akan mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas di sektor kelautan dengan menjadikan perikanan dan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat.

Selain itu, dalam konteks nasional, Selayar ditetapkan dan diposisikan sebagai “Pusat Pengembangan Budidaya Ikan karang Nasional” sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan baik pada tataran regional (sulawesi selatan), maupun pada tataran nasional.

Peran sub sektor perikanan terhadap pembentukan sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta mulai memberikan gambaran bahwa ke depan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

3. RPJM Ketiga (2015 – 2020)

Pelaksanaan tahap ketiga dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 akan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas perikanan.



Neraca perdagangan untuk komoditas perikanan semakin menunjukkan kontribusinya bagi percepatan perputaran ekonomi Selayar serta memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Daya beli masyarakat semakin membaik yang ditandai dengan semakin tingginya kualitas hidup masyarakat serta membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat.

Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari diupayakan dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan.

4. RPJM Keempat (2020 – 2025)

Tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar akan difokuskan pada semakin terbukanya usaha-usaha ekonomi di sektor sekunder dan tersier yang mampu menyerap seluruh tenaga kerja lokal serta pemanfaatan potensi minyak melalui aktivitas pengeboran pada Blok Selayar.

Sejalan dengan itu, secara siltultan Kabupaten Kepulauan Selayar telah memposisikan dirinya sebagai daerah strategis dengan dijadikannya sebagai Pusat Distribusi Logistik dan industri perminyakan di kawasan Timur Indonesia.

Pada akhirnya, eksistensi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim menjadi sebuah kenyataan dengan ciri utama : (a) tumbuhnya sektor perikanan; (b) berkembangnya industri sekunder dan tersier di sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata; (c) semakin tingginya transaksi perdagangan baik antar daerah maupun kegiatan ekspor inpor.



BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bupati Kepulauan Selayar berkewajiban melaksanakan peraturan daerah ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh sebab itu perlu disosialisasikan secara luas kepada segenap pemangku kepentingan, untuk dapat memahaminya secara mendalam dan menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya pada penjabaran RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya.
- c. Pemerintah Desa dalam menyusun RPJP Desanya, mengacu pada RPJPD Kabupaten dan bagi desa yang telah menyusun RPJP Desa melakukan penyerasian dalam RPJM Desa atau menjadi acuan dalam perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD Desa
- d. Tokoh masyarakat, Pimpinan Organisasi Keagamaan, Lembaga Budaya, Komunitas Adat, Organisasi Sosial, Kalangan Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggung jawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaan.



BAB VI P E N U T U P

Alhamdulillah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk jangka waktu 20 tahun (2005 - 2025 dapat diselesaikan. Penjabaran lebih rinci akan disusun lebih lanjut secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Proses penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang ini memakan waktu cukup lama, melibatkan orang cukup banyak, membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penghimpunan naskah akademis, pembahasan di DPRD, konsultasi dengan berbagai pihak, sampai pada musrembang dan penetapannya menjadi peraturan daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan dokumen perencanaan ini berkualitas dan betul-betul dapat mengarahkan pembangunan Selayar 20 tahun ke depan.

Dokumen perencanaan ini hanya dapat diaplikasikan dengan baik jika mendapat dukungan dari para pelaku pembangunan. Karena itu, kami berharap kiranya semua pihak dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi positif secara konsisten dan konsekuen, dengan semangat profesionalisme yang bernafaskan keagamaan (*Tappa Ri Alla Ta'ala*, '*Kontu Toje*'), transparansi, akuntabel, sikap mental, dan disiplin yang tinggi, dengan menerapkan prinsip *siri*' yang didorong oleh semangat *Ssamaturu*, *Ssipakatau*, dan '*Bulo Sibatang - 'Munte Sibatu*, baik jajaran pemerintahan, kalangan swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah kita berharap dan berserah diri semoga semua bentuk aktivitas kita bernilai ibadah di sisiNya dan memperoleh pahala berlipat ganda.